

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun, secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos* atau *kratein*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan rakyat berkuasa atau “*government or rule by the people*” (pemerintahan oleh rakyat).

Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Menurut Abraham Lincoln, “Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi yaitu ada di kuasa rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak. Demokrasi merupakan sebuah proses perkembangan kehidupan politik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun faktor eksternal yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi.

Heru Nugroho dalam Pengantar Publikasi Versi Indonesia tentang Demokrasi dan Demokratisasi mengatakan bahwa abad ke-21 merupakan “musim semi demokrasi”, baik yang berlangsung di Negara-negara penganut paham sosialisme, maupun Negara-negara berkembang menuju masyarakat industri.

Sejarah menunjukkan bahwa pemuda dan mahasiswa selalu menjadi bagian dari pilar demokrasi, sebagai pelopor, penggerak, bahkan pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan pada era Sumpah Pemuda 1928, pergerakan 1945, angkatan 1966 yang membidani Tritura, Malari 1974, dan Reformasi 1998.

Maka peran mahasiswa sering kali disebut sebagai *transformer* atau pembawa perubahan atau digelari sebagai "*agent of change*". Namun dengan adanya perkembangan politik yang dilatarbelakangi demokrasi sebagai sistem politik, peran pemuda khususnya mahasiswa mulai dihadapkan pada persimpangan pemikiran dan gerakan, sehingga tujuan untuk membangun perubahan ke situasi yang lebih baik justru yang terjadi sebaliknya.

Berbagai aksi demonstrasi yang dianggap suatu bentuk gerakan yang dilakukan mahasiswa akhir-akhir ini sebagai wujud kritik terhadap pemerintahan mulai mengalami kemerosotan kepercayaan dari masyarakat, bahkan aksi demonstrasi seringkali disinyalir sudah dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan elit yang berkuasa.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat

dan rakyat memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain berdemokrasi.

Tanpa adanya kesadaran demokrasi, maka tingkat partisipasi politik masyarakat juga rendah yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Kesadaran demokrasi dapat diperoleh melalui beberapa hal, salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi, terutama bagi para mahasiswa untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan.

Organisasi gerakan mahasiswa telah banyak berpengaruh terhadap perkembangan dan praktek demokrasi di Indonesia yang mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui aksi atau demo yang mereka lakukan yang terkadang bersifat anarkhis. Menurut Silvia Sukirman (2004:72-73), organisasi kemahasiswaan terdiri dari:

“Organisasi kemahasiswaan intra-universiter, disebut juga organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi, adalah organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, seperti; Senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi kemahasiswaan dibagi menjadi dua, yaitu organisasi intra kampus dan ekstra kampus. Organisasi mahasiswa intra kampus adalah organisasi mahasiswa yang berada di lingkungan perguruan tinggi dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari pengelola perguruan tinggi atau dari Kementrian/Lembaga. Misalnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).

Sedangkan organisasi ekstra kampus merupakan organisasi mahasiswa yang aktivitasnya berada di luar lingkup universitas atau perguruan tinggi. Organisasi mahasiswa ekstra kampus di Indonesia antara lain adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKI), dan lain-lain.

Organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut baik intra kampus maupun ekstra kampus telah memberikan peran positif dalam memberikan pemahaman terhadap kehidupan demokrasi di lingkungan kampus. Mahasiswa merupakan golongan masyarakat yang mendapatkan pendidikan tertinggi, mempunyai perspektif luas untuk bergerak diseluruh aspek kehidupan serta merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan akademis dan politik.

Oleh karenanya, mahasiswa berorganisasi dengan membentuk *student government* dalam rangka pengembangan dirinya. Seperti yang disampaikan oleh M. Rusli Karim (1985:318)

“Bahwa berorganisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat berorganisasi mahasiswa telah tertanam kebiasaan disiplin dan patuh terhadap segala tata karma di dalam organisasi diharapkan tumbuh pula kesadaran semacam itu kelak setelah terjun ke masyarakat.”

Eksistensi organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah salah satu nilai strategis untuk memupuk jiwa kepemimpinan, keberanian,

mengungkapkan pendapat, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh misalnya dilakukan melalui kegiatan musyawarah mahasiswa atau lazim dikenal dengan istilah MUMAS.

Keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah perkumpulan/organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan hak yang melekat dalam diri mahasiswa yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi pasal 109 ayat 1 point (h) dan (i).

- (h) Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- (i) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan

Keberadaan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi tepatnya pasal 111 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Mengacu kepada peraturan tersebut, penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sebesar-besar dilaksanakan oleh mahasiswa, maka landasan hukum penyelenggaraannya pun merupakan hasil dari kesepakatan anggota yang berhimpun dalam organisasi tersebut dengan tidak bersinggungan dengan aturan dari lembaga (universitas).

Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah sebagai sarana pembelajaran demokrasi dikalangan mahasiswa. Seperti yang diungkapkan oleh Dodi Rudianto (2010: 12), sejak 1978 kehidupan intra kampus sangat umum ditandai oleh arena kebebasan mimbar akademik yang demokratis.

Salah satunya adalah wahana pembelajaran mahasiswa untuk belajar berpolitik didalam kampus dengan instrumen sistem organisasi kemahasiswaan yang egaliter disebutnya sebagai pemerintahan mahasiswa (*student government*). Dalam struktur organisasi kemahasiswaan terdapat pula pembagian kekuasaan sesuai dengan *trias politica* Montesque.

Pembagian kekuasaan tersebut terdiri atas badan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan (Badan Eksekutif Mahasiswa), badan legislatif (Dewan Perwakilan Mahasiswa) sebagai pembuat peraturan bersama eksekutif dan badan yudikatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dengan melaksanakan Musyawarah Mahasiswa atau Sidang Umum yang berfungsi untuk meminta laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode, membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, serta menyelenggarakan sidang istimewa ketika ditenggarai ada penyimpangan yang dilakukan oleh badan eksekutif (BEM) maupun badan legislatif (DPM).

Selain sebagai *miniature state* yang menerapkan *trias politica*, organisasi kemahasiswaan memiliki nilai yang amat strategis terutama dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat orang lain.

Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan forum tertinggi organisasi kemahasiswaan yaitu musyawarah mahasiswa atau sidang umum.

Dalam organisasi kemahasiswaan ada beberapa nilai demokrasi yang harus tumbuh dalam badan organisasi. Henry B Mayo dalam bukunya “*Introduction to Democratic Theory*” merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*).
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi di organisasi kemahasiswaan tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan tindakan yang mandiri, melatih rasa toleransi terhadap pendapat, kepentingan dan bentuk kehidupan yang berbeda dan untuk mengenali budaya berselisih secara demokratis di mana aturan main standarnya adalah mampu menjadi pendengar, membiarkan orang lain berbicara dan *fairplay*.

Fokus dari sebuah masyarakat demokratis adalah tanggungjawab terhadap diri sendiri dan ikut serta bertanggungjawab yang dapat dilakukan dalam banyak bentuk, salah satunya melalui aktivitas dalam perkumpulan atau organisasi. Akan tetapi pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di organisasi kemahasiswaan sebagai miniature state tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Jika mengacu pada konsep penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, maka pemilihan umum menjadi salah satu cirinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Teuku May Rudy (2007: 87) bahwa “melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan”. Artinya dengan pemilu masyarakat memberi mandat bagi parlemen dan pemerintah untuk mengurus negara. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, yang mana dalam konteks penelitian ini yang menjadi rakyat adalah mahasiswa sebagai anggota organisasi.

Sikap yang harus dikembangkan untuk membudayakan perilaku yang mendukung tegaknya prinsip demokrasi di dalam organisasi, antara lain seperti yang disampaikan oleh M. Rusli Karim (1991:70) yaitu :

1. Terbuka dan transparan untuk memupuk kepercayaan terhadap satu sama lain.
2. Terbiasa melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah, sehingga timbul sikap toleransi.
3. Menghargai pendapat orang lain.
4. Toleransi atau belajar menerima keberagaman.
5. Menghargai kelompok minoritas.
6. Menutamakan kepentingan umum.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 31 Mei 2016, Ketua Ketua HIMA PKnH Fazar Kurniawan mengemukakan pendapat bahwa masih terdapat beberapa masalah yang kiranya perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehingga tujuan terciptanya demokrasi di lingkungan kampus dapat tercapai secara maksimal. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Pemilihan ketua kelembagaan yang mana partisipasi dari mahasiswa

dinilai masih 50%.

2. Kegiatan perlombaan seperti Liga angkatan (antar angkatan), FKIP Fair (antar jurusan), dan BEM Cup (antar fakultas) yang dalam proses perlombaan terkadang tak luput dari perilaku tidak *sportif* mahasiswa sehingga terjadi perkelahian atau sikap anarkis.
3. Forum diskusi yang diadakan oleh organisasi maupun himpunan sebagai wahana pembelajaran termasuk didalamnya pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa, ternyata tidak dapat menarik minat mahasiswa terhadap program dari himpunan yang mana jumlah peserta yang terlibat masih sedikit. Kondisi demikian menjadikan ormawa sebagai laboratorium demokrasi tidak berjalan maksimal.

Melihat data-data dan fakta-fakta yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan nilai-nilai demokrasi di mahasiswa apakah sudah berjalan dengan baik ataukah belum sepenuhnya terlaksana. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAHASISWA** (Studi Deskriptif Terhadap Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung).

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang timbul antara lain:

1. Kurangnya perhatian mahasiswa akan kontribusi terhadap pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di lingkungan kampus.
2. Mahasiswa masih ada yang melakukan demonstrasi secara anarki dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya.
3. Ketidakpahaman dan ketidak tanggungjawabnya mahasiswa sebagai pelaksana dari nilai-nilai demokrasi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi mahasiswa?”

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan Himpunan Mahasiswa PKnH di FKIP UNPAS Bandung?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan program implementasi nilai-nilai demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH FKIP UNPAS Bandung?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program tersebut dalam usaha menerapkan nilai-nilai demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH FKIP UNPAS Bandung?
4. Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi mahasiswa di Himpunan Mahasiswa PKnH FKIP Universitas Pasundan Bandung?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui gambaran dan memperoleh data tentang implementasi nilai-nilai demokrasi dalam organisasi mahasiswa di Himpunan PKnH Universitas Pasundan Bandung.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang:

- 1) Penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan Himpunan Mahasiswa PKnH di FKIP UNPAS Bandung.
- 2) Pelaksanaan program implementasi nilai-nilai demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH FKIP Universitas Pasundan Bandung.
- 3) Hambatan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH FKIP Universitas Pasundan Bandung.
- 4) Upaya dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam Himpunan Mahasiswa PKnH FKIP Universitas Pasundan Bandung.

F. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah

ilmu pendidikan mengenai penerapan nilai-nilai demokrasi melalui organisasi mahasiswa.

2. Manfaat kebijakan

Secara kebijakan penelitian ini diharapkan dapat mengurangi pemikiran dasar orang banyak yang menganggap bahwa pendidikan demokrasi di Indonesia hanya sebatas hapalan semata dan tidak di aplikasikan. Apabila masalah ini dibiarkan saja maka ditakutkan masyarakat tidak akan percaya lagi kepada pendidikan di Indonesia.

3. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk sebagai berikut:

- a. Diketuinya nilai-nilai demokrasi telah diterapkan dengan baik di Organisasi Mahasiswa khususnya Himpunan Mahasiswa PKnH Universitas Pasundan Bandung.
- b. Diketuinya partisipasi dan peranan pengurus organisasi mahasiswa dalam konteks pembinaan kehidupan demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH Universitas Pasundan Bandung.
- c. Diketuinya upaya yang diterapkan organisasi mahasiswa agar mahasiswa mampu belajar untuk berada di kehidupan demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH Universitas Pasundan Bandung.
- d. Diketuinya kendala yang dihadapi dalam usaha menerapkan kehidupan demokrasi di Himpunan Mahasiswa PKnH.

G. Kerangka Pemikiran

Eksistensi organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah salah satu nilai strategis untuk memupuk jiwa kepemimpinan, keberanian mengungkapkan pendapat serta keberanian dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh misalnya dilakukan melalui kegiatan musyawarah mahasiswa atau lazim dikenal dengan istilah MUMAS.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi tepatnya pasal 111 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Mengacu kepada peraturan tersebut, penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sebesar-besar dilaksanakan oleh mahasiswa, maka landasan hukum penyelenggaraannya pun merupakan hasil dari kesepakatan anggota yang berhimpun dalam organisasi tersebut dengan tidak bersinggungan dengan aturan dari lembaga (universitas).

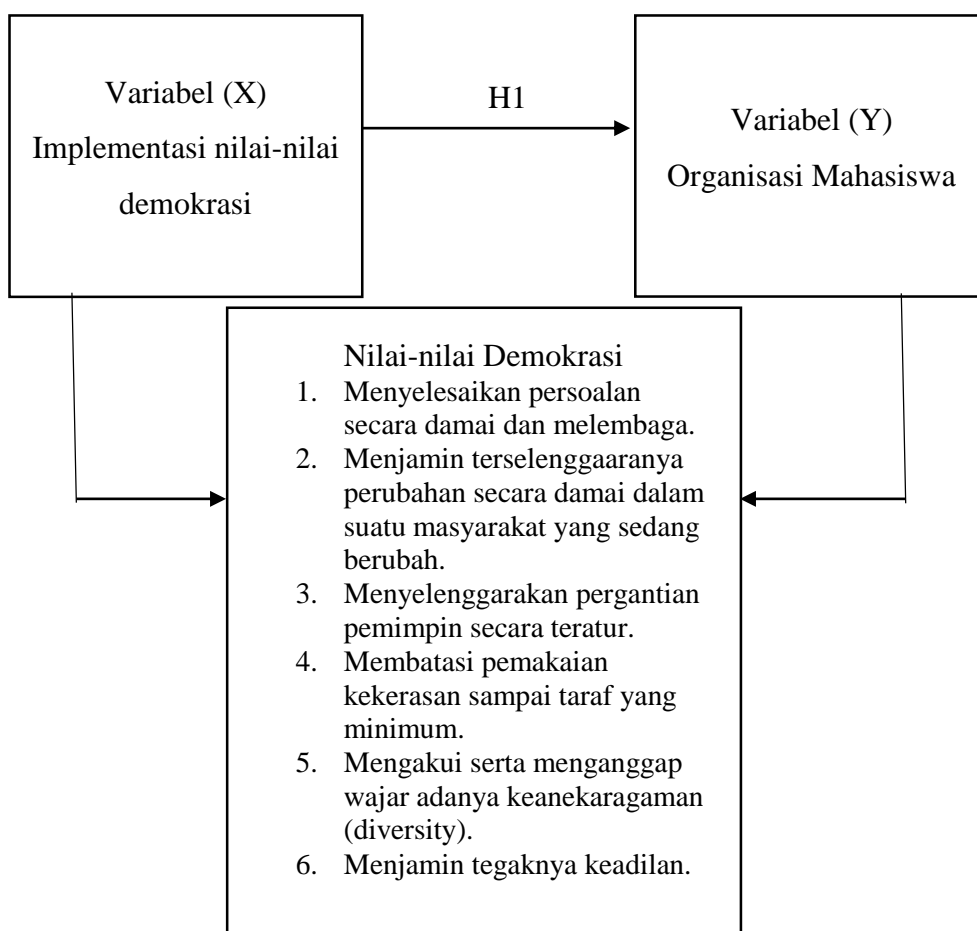
Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah sebagai sarana pembelajaran demokrasi dikalangan mahasiswa. Seperti yang diungkapkan oleh Dodi Rudianto (2010: 12), sejak 1978 kehidupan intra kampus sangat umum ditandai oleh arena kebebasan mimbar akademik yang

demokratis. Salah satunya adalah wahana pembelajaran mahasiswa untuk belajar berpolitik didalam kampus dengan instrumen sistem organisasi kemahasiswaan yang egaliter disebutnya sebagai pemerintahan mahasiswa (*student government*).

Berdasarkan landasan teori dan beberapa definisi yang ada, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Paradigma Sederhana



Keterangan :

Variabel X = Variable independen (variable bebas) merupakan variable yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variable dependen (variable terikat) jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi.

Variabel Y = Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dan pengertian terhadap beberapa istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka penulis memberikan penjelasan yang dirumuskan ke dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). Yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah aktivitas, aksi, dan tindakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.

2. Nilai-nilai Demokrasi

Henry B Mayo dalam bukunya *“Introduction to Democratic Theory”* merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatumasyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

3. Organisasi Mahasiswa

Yang dimaksud organisasi mahasiswa dalam penelitian ini adalah Himpunan Mahasiswa PKnH di FKIP Universitas Pasundan Bandung.

I. Struktur Organisasi Skripsi

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam struktur organisasi skripsi berikut dengan pembahasannya. Struktur organisasi skripsi tersebut disusun sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan, Berisikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, definisi operasional, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II kajian teori, Berisikan tentang konsep-konsep atau teori-teori utama dan pendapat para ahli yang terkait dengan bidang yang dikaji, yaitu tinjauan tentang nilai-nilai demokrasi dan tinjauan organisasi.
3. Bab III metode penelitian, Berisikan penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian dan beberapa komponen, komponen yang dimaksud adalah desain penelitian, partisipan, tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.
4. Bab VI hasil penelitian dan pembahasan, Berisi tentang hasil temuan dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

5. Bab V kesimpulan dan saran, Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan juga saran atau rekomendasi ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan penelitian berikutnya.